



Laporan Keuangan **Semester I** Tahun Anggaran 2024



Laporan Keuangan **Semester I** Tahun Anggaran 2024

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 10 Juli 2024

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan,



A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 10 Juli 2024

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan,



A. RITA HSIANA DWI KUSWARDANI

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA.2024 adalah sebesar Rp51,020,186.00 atau mencapai 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp.0.00

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp5,020,496,230.00 atau mencapai 40.81 % dari alokasi anggaran sebesar Rp12,300,000,000.00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1,226,165,807.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp162,741,486.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp942,383,861.00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp121,040,460.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp435,435,211.00 dan Rp790,730,596.00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5,445,028,885.00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5,445,028,885.00) Surplus kegiatan Non Operasional sebesar Rp41,540,186.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5,403,488,699.00).

4. PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp1,224,695,851.00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5,403,488,699.00) ditambah dengan koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp0,00,- kemudian ditambah koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp47,400.00 lalu ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4,969,476,044.00. Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp790,730,596.00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	51.020.186	0,00	12.250.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	51.020.186	0,00	12.250.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	8.000.000.000	3.821.374.047	47,77	3.411.557.676
Belanja Barang	B.4	4.300.000.000	1.199.122.183	27,89	1.460.637.597
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Pinjaman dan Hibah					
JUMLAH BELANJA		12.300.000.000	5.020.496.230	40,82	4.872.195.273

II. NERACA

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN NERACA PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2024	2023
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120.000.000	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.610.586	-
	Piutang PNPB	C.4	-	9.480.000
	Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	(47.400)
	Piutang Bukan Pajak (NETO)	C.8	-	9.432.600
	Persediaan	C.9	40.130.900	15.433.835
	Jumlah Aset Lancar		162.741.486	24.866.435
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.13	-	-
	Peralatan dan Mesin	C.14	5.536.967.016	5.963.469.718
	Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
	Aset Tetap Lainnya	C.17	517.203.788	517.203.788
	Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(5.111.786.943)	(5.389.545.234)
	Jumlah Aset Tetap		942.383.861	1.091.128.272
ASET LAINNYA				
	Aset Tak Berwujud	C.20	377.835.394	377.835.394
	Aset Lain-Lain	C.21	426.502.702	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(683.297.636)	(269.134.250)
	Jumlah Aset Lainnya		121.040.460	108.701.144
JUMLAH ASET			1.226.165.807	1.224.695.851
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN				
	Uang Muka dari KPPN	C.23	120.000.000	-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	290.446.211	-
	hibah yang belum disahkan	C.25	-	-
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	24.989.000	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.27	435.435.211	-
JUMLAH KEWAJIBAN			435.435.211	-
EKUITAS				
	Ekuitas	C.28	790.730.596	1.224.695.851
JUMLAH EKUITAS			790.730.596	1.224.695.851
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			1.226.165.807	1.224.695.851

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN			Rp -	Rp -
BEBAN				
	Beban Pegawai	D.2	Rp 3.620.786.857	Rp 5.697.357.890
	Beban Persediaan	D.3	Rp 30.983.809	Rp 58.402.275
	Beban Barang dan Jasa	D.4	Rp 1.082.335.319	Rp 1.168.748.900
	Beban Pemeliharaan	D.5	Rp 110.486.394	Rp 112.333.547
	Beban Perjalanan Dinas	D.6	Rp 335.838.244	Rp 229.391.579
	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
	Beban Bantuan Sosial	D.8		
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	Rp -	Rp 266.365.571
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	Rp -	Rp -
	Beban Lain-lain	D.11	Rp -	Rp -
JUMLAH BEBAN			Rp 5.180.430.623	Rp 7.532.599.762
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(5.180.430.623)	(7.532.599.762)
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		D.12		
	Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		Rp 12.250.000	Rp 12.564.000
	Beban dari kegiatan non operasional lainnya		Rp -	Rp -
	Defisit Selisih			
	SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		Rp 12.250.000	Rp 12.564.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			(5.168.180.623)	(7.520.035.762)
POS LUAR BIASA		D.13		
	Pendapatan PNB		Rp -	Rp -
	Beban Perjalanan Dinas		Rp -	Rp -
	Beban Persediaan		Rp -	Rp -
SURPLUS/DEFISIT LO			(5.168.180.623)	(7.520.035.762)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
EKUITAS AWAL	E.1	1.224.695.851	2.277.987.363
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.403.488.699)	(5.345.781.793)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	47.400	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4		
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.5		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.6	47.400	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.8	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.9	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.10	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.11		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.12	4.969.476.044	4.859.945.273
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(433.965.255)	(485.836.520)
EKUITAS AKHIR		790.730.596	1.792.150.843

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BRSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan keuangan

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;

5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

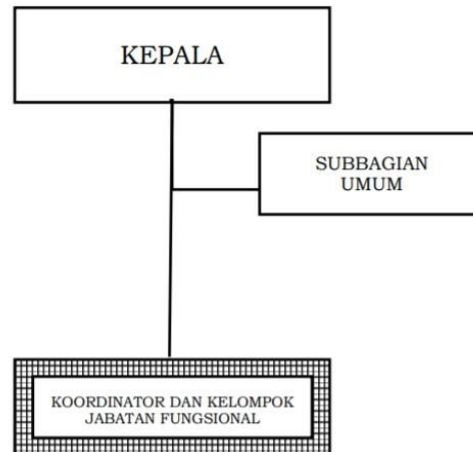
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi :

- 1) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ;

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 . Struktur Organisasi BBRSEKP

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Peran strategis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai institusi riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan keputusan para pemangku kebijakan (science based policy) yaitu kebijakan pembangunan berbasis pada riset dan inovasi. Konsep ini merupakan bagian dari tahapan visi presiden 2020-2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BRSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BRSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BRSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsinten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengikatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP

2. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BRSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (science based policy);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;

A.2. KERAGAMAN SDM BBRSEKP

“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”

Pada tahun 2022, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki 60 orang pegawai yang terdiri dari 43 PNS, 13 PPNP dan 4 Tenaga Outsourcing. Komposisi dari pegawai BBRSEKP sebagai berikut :





Gambar 2. Keragaan SDM BBRSEKP

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah

a. Perpustakaan

Perpustakaan BBRSEKP merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas serta tugas dan fungsi BBRSEKP. Perpustakaan BBRSEKP telah menjalankan perannya sebagai pusat penyediaan informasi berupa bahan pustaka, bahan rujukan, penyedia literatur untuk meningkatkan kompetensi peneliti BBRSEKP. Koleksi perpustakaan BBRSEKP terdiri dari buku referensi, buku hasil penelitian, koleksi digital (e-books, e-journals), koleksi audiovisual dan lain-lain. Selain itu untuk meningkatkan pelayanannya, perpustakaan BBRSEKP masih terus mengembangkan system perpustakaan digital (<http://bbpse.litbang.kkp.go.id/perpustakaan>)

Pengembangan perpustakaan digital dimaksudkan agar layanan perpustakaan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna khususnya pegawai BBRSEKP selain itu kerjasama antar perpustakaan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi khususnya unit kerja yang ada untuk dapat melaksanakan “resource sharing” dapat terjalin.

b. Laboratorium Sosial Ekonomi

Untuk mewujudkan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai Center of excellent dalam lingkup manajemen hasil penelitian dan pengelolaan data sosial ekonomi kelautan dan perikanan, saat ini BBRSEKP sedang dalam tahap pembangunan Laboratorium Sosial Ekonomi. Laboratorium Sosial Ekonomi adalah sebuah pusat manajemen dan sistem komputasi data sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk optimalisasi peran institusi di dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kegiatan utama yang dilakukan Laboratorium Sosial Ekonomi adalah (1) penyebarluasan informasi dan hasil penelitian; (2) mengembangkan model komputasi penelitian sosial ekonomi yang mendukung pengembangan masyarakat dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan (3) pelayanan konsultasi dan penelitian serta penanganan masalah masalah sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

c. Sarana dan prasarana lainnya

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tidak memiliki aset berupa tanah dan gedung/bangunan. Kantor yang ditempati adalah kantor milik Sekretariat BRSDMKP yaitu di Gedung BRSDMKP 1 di Jalan Pasir Putih 1 Ancol Jakarta Utara. Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki dan dikelola meliputi sarana dan prasarana riset yang terdiri atas: kendaraan operasional, laptop/komputer, kamera/handycam /alat perekam lainnya, perpustakaan, laboratorium data, software pengolah data; dan sarana dan prasarana non riset yang terdiri atas kendaraan pimpinan, meubelair, dan peralatan perkantoran lainnya. Sarana dan prasarana di atas merupakan bagian dari aset/barang milik negara (BMN). Dalam rangka akreditasi dan penguatan laboratorium sosial ekonomi, dukungan sarana dan prasarana akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan laboratorium sosial ekonomi untuk mengoptimalkan peran institusi sebagai penyedia data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

A. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

B. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset tetap

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

D. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

E. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20
Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangkan akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6). Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7). Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

(8). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31

Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak lima kali dari DIPA awal, pagu awal Sebesar Rp12,300,000,000.00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp12,300,000,000.00.

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Uraian	2024	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
Belanja Barang	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00

Revisi tersebut tidak merubah Pagu tapi melainkan perubahan Hal III DIPA dan perubahan POK Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan layanan manajemen SDM

B.1. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp51,020,186.00 atau mencapai 0 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Pendapatan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan lain-lain dan Pendapatan Lain-lain II. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	51.020.186	-
Pendapatan Anggaran Lain - Lain	-		
Jumlah	-	51.020.186	-

Realisasi
Perimaan Negara
Bukan Pajak
Rp51,020,186.00

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Kembali belanja Tahun Anggaran Yang lalu	51.020.186	12.250.000	316,49
Pendapatan Lain-lain		-	
Jumlah	51.020.186	12.250.000	316,49

Realisasi Pendapatan TA 2024 adanya pendapatan pengembalian belanja pegawai tahun yang lalu merupakan dari pengembalian Tunjangan struktural dan Tunjangan fungsional dari bulan November 2022 sd November 2023 sebesar Rp51,020,186.00,- terdiri dari

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 14,814,094.00
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 36,206,092.00

*Realisasi Belanja
Negara Rp
5,020,496,230.00*

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara periode 30 Juni Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 5,020,496,230.00 atau mencapai 40,82% dari anggarannya belanja sebesar Rp 12,300,000,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode semester I Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

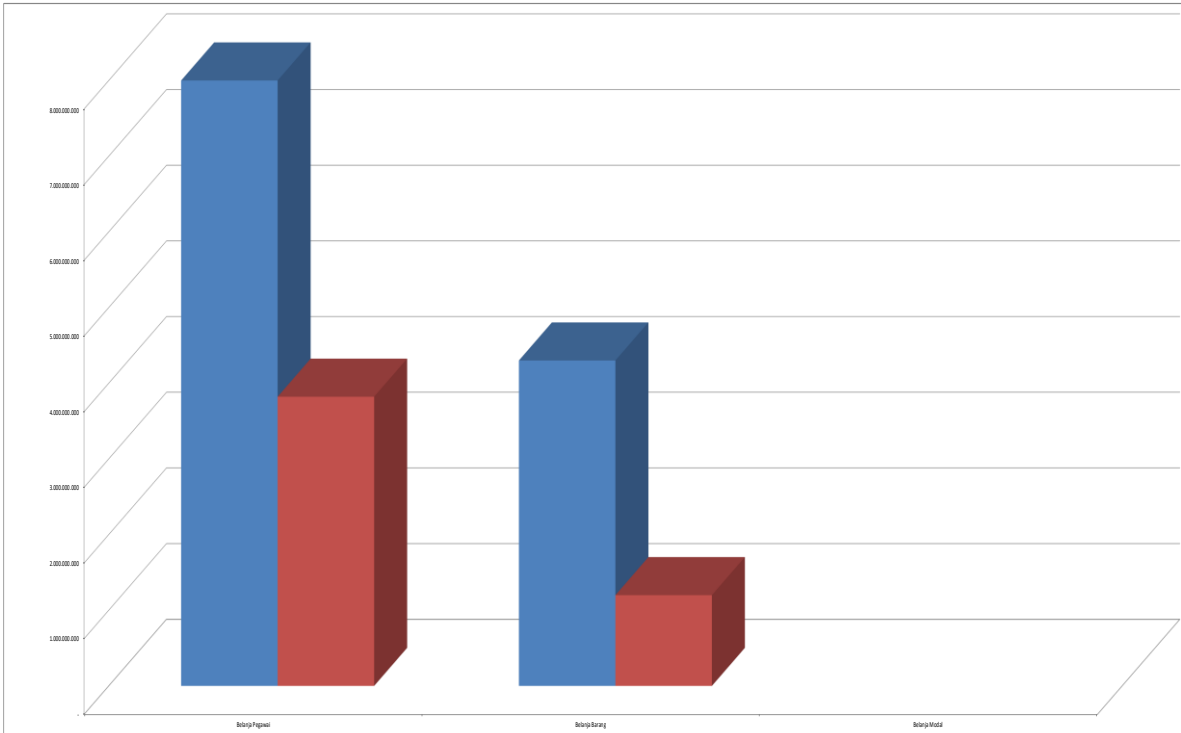
Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	8.000.000.000	3.821.374.047	47,77
Belanja Barang	4.300.000.000	1.199.122.183	27,89
Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	12.300.000.000	5.020.496.230	40,82
Pengembalian Belanja		-	
Dana PHLN Hibah	-		
Jumlah Belanja Netto	12.300.000.000	5.020.496.230	40,82

Realisasi belanja senilai Rp5,020,496,230.00 terdiri dari:

- Pelayanan Kehumasan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp22,511,450.00
- Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp116,300,258.00
- Pelayanan Data Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp15,049,250.00
- Pelayanan Sistem Informasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp4,340,000.00
- Gaji dan Tunjangan dengan total realisasi Rp 5,018,248,910.00
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan total realisasi Rp 976,305,238.00
- Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp26,042,654.00
- Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp48,762,463.00
- Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp25,671,800.00
- Pelayanan Keuangan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan total realisasi Rp56,394,070.00

Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan Penelitian dan Rencana Operasional Kegiatan Manajerial. Adapun persentase penyerapan anggaran sebesar 40,82 % merupakan bagian dari kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Di samping itu alokasi anggaran Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan *top-down* sesuai dengan kebutuhan Teknis dan arahan pimpinan.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Tahun 2024

Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	30 June 2024	30 June 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.821.374.047	3.411.557.676	12,01
Belanja Barang	1.199.122.183	1.460.637.597	(17,90)
Belanja Modal			
Jumlah	5.020.496.230	4.872.195.273	3,04

Realisasi Belanja Semester I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,04 % dibandingkan pada semester I TA 2023. Hal ini disebabkan kenaikan pagu Belanja Pegawai dan realisasi belanja Pegawai yang disebabkan karena adanya penambahan pegawai PPPK BBRSEKP pada tahun 2023 dan kenaikan jabatan fungsional pegawai BBRSEKP tahun 2024

Belanja Pegawai
Rp
3,821,374,047.00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,821,374,047.00 dan Rp3,411,557,676 atau terjadi kenaikan sebesar 10,26 % dari TA yang lalu. Namun karena terdapat pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, menjadi 9,82 %. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain adanya pegawai yang dilantik menjadi jabatan fungsional.

Tabel 9 . Perbandingan Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.237.180.660	1.215.957.020	1,75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.611	21.582	(9,13)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91.706.510	92.125.700	(0,46)
Belanja Tunj. Anak PNS	28.985.806	29.802.206	(2,74)
Belanja Tunj. Struktural PNS	16.200.000	20.520.000	(21,05)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	205.851.000	309.201.000	(33,42)
Belanja Tunj. PPh PNS	21.018.767	5.867.367	258,23
Belanja Tunj. Beras PNS	66.336.720	73.144.200	(9,31)
Belanja Uang Makan PNS	92.537.000	91.660.000	0,96
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.840.000	10.390.000	(14,92)
Belanja Uang Lembur	2.171.000	0	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.785.753.732	1.562.868.931	14,26
Beban gaji pokok PPPK	99.756.800		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.456		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.849.920		
Beban Tunjangan Anak PPPK	914.816		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15.840.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.634.880		
Beban Uang Makan PPPK	11.148.000		
Beban uang Lembur PPPK	494.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)/kinerja PPPK	127.132.369		
Jumlah Belanja kotor	3.821.374.047	3.411.558.006	12,01
Pengembalian Belanja Pegawai	14.814.094		
Jumlah Belanja	3.806.559.953	3.411.558.006	11,58

Belanja Barang
Rp
1,199,122,183.00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 1,199,122,183.00** dan **Rp 1,460,637,597.00** . Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024.

Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	551.039.115	856.296.719	-35,65
Belanja Barang Non Operasional	17.993.600	35.495.600	-49,31
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	76.925.664	46.096.140	66,88
Belanja Pemeliharaan	150.200.859	108.237.394	38,77
Belanja jasa	125.741.600	83.000.000	51,50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	277.221.345	331.511.744	-16,38
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.199.122.183	1.460.637.597	-17,90
Pengembalian Belanja Barang			
Jumlah Belanja	1.199.122.183	1.460.637.597	-17,90

Realisasi tersebut mengalami penurunan 17,90 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan belanja keperluan perkantoran yang merupakan belanja gaji pegawai PPNPN semula 21 menjadi 13 orang pada bulan Juni 2024.

*Belanja Modal
Rp0,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tidak adanya anggaran belanja modal

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
peralatan dan
Mesin Rp0,00.

B.5.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja modal

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan kantor dan alat rumah tangga			
Alat angkut	0	0	0,00
Peralatan laboratorium			
Peralatan komputer	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya sebesar
Rp.0,00

B.5.2 Belanja Modal lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Data Survey BPS	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120.000.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp120,000,000.00 dan Rp90,000,000.00 . Kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran berasal dari alokasi saldo rekening Koran sebesar Rp66,198,586.00 dan Uang Muka di bendahara pengeluaran sebesar Rp36,555,000.00 dan kuitansi belum di GUP sebesar Rp19,857,000.00 dan Saldo Lainnya berupa GUP KKP yang belum dibayarkan pada bank penerima Kartu Kredit sebesar Rp(2,610,586.00) Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Saldo Menurut Rekening Koran	66.198.586	-
Uang Muka di Bendahara Pengeluaran	36.555.000	-
Kuitansi Belum SPJ UP	19.857.000	-
Kas Lainnya Pada Bank	(2.610.586)	-
Jumlah	120.000.000	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp2,610,586.00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(2,610,586.00) dan Rp0.00. Kas Lainnya merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas Lainnya tersebut merupakan UP KKP melalui SPM GUP KKP yang belum dibayarkan pada 30 Juni 2024. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.610.586	-
Jumlah	2.610.586	-

Piutang Bukan Pajak
NETTO Rp0.00

C.1.2 Piutang Bukan Pajak NETTO

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp9,432,600.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan	30-Jun-24	31-Dec-23
Piutang Bukan Pajak	-	9.432.600
Jumlah	-	9.432.600

Persediaan
Rp40,130,900.00

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp40,130,900.00 dan Rp15,433,835.00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang konsumsi atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan Perbandingan
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Akun	30/06/2024	31/12/2023
BARANG KONSUMSI		
Alat Tulis	886.150	11.450
Tinta Tulis, Tinta Stempel	22.500	76.500
Penjepit Kertas	2.068.420	1.081.520
Penghapus/Korektor	424.850	147.880
Buku Tulis	91.000	10.000
Ordner Dan Map	2.634.620	1.178.375
Penggaris	42.970	128.910
Cutter (Alat Tulis Kantor)	273.200	108.000
Alat Perekat	1.655.215	1.083.970
Barang Cetakan	724.500	
Alat Tulis Kantor Lainnya	237.500	652.350
Kertas HVS	510.025	3.529.500
Berbagai Kertas	0	632.320
Amplop	384.750	
Kop Surat	1.332.000	0
Kertas dan Cover Lainnya	0	4.913.850
Pita Printer	0	569.000
Tinta/Toner Printer	25.840.200	885.860
Disket	0	0
USB/Flashdisk	0	
Mouse	1.400.000	424.350
CD/DVD	0	
Bahan Komputer Lainnya	0	0
Batu Baterai	1.603.000	0
Alat Listrik Lainnya	0	0
Bahan Keg.Kantor Lainnya	0	0
BARANG KONSUMSI	40.130.900	15.433.835

Mutasi Persediaan pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Mutasi Persediaan pada 30 Juni 2024

SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	15.433.835
Barang Habis Pakai	
Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
Mutasi Tambah	82.057.664
a) Pembelian	82.057.664
- Barang Habis Pakai	82.057.664
- Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	-
Mutasi Kurang	57.360.599
Pemakaian	57.360.599
Rusak/Usang	
Diserahkan kepada Pemda	
SALDO AKHIR, Per 30 Juni 2024	40.130.900

Saldo awal Barang Habis Pakai per 31 Desember 2023 senilai **Rp15,433,835.00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, terdapat pembelian Barang Habis Pakai senilai **Rp82,057,664.00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, usb/flash disk. Terdapat pemakaian barang Habis pakai barang konsumsi yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor selama periode per 30 Juni 2024 senilai **Rp57,360,599.00** dan Saldo Akhir senilai **Rp40,130,900.00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya. Semua persediaan dalam keadaan baik.

Peralatan dan Mesin
Rp.5.963.469.718,00

C.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5,536,967,016.00 dan Rp5.963.469.718.00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2023	5.963.469.718
Mutasi Tambah	-
Pembelian (101)	-
Transfer Masuk (102)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Pengembangan Nilai Aset	
Mutasi Tambah Penunjang Operasional	
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi Kurang	426.502.702
Reklasifikasi keluar	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	426.502.702
Saldo Per 30 Juni 2024	5.536.967.016
Akumulasi Penyusutan	(5.111.786.943)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	425.180.073

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar 5,536,967,016.00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 5,963,469,718.00 mutasi tambah sebesar Rp0.00 dan mutasi kurang sebesar Rp426,502,702.00

Aset Tetap Lainnya
Rp517.203.788,00

C.2.1 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp517,203,788,00** dan **Rp517,203,788,00** yang merupakan aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya tersebut merupakan buku - buku yang terdapat di perpustakaan tidak ada mutasi tambah atau kurang atas aset tetap lainnya untuk semester I.TA. 2024. Rincian aset tetap lainnya disajikan pada lampiran laporan keuangan ini.

Tabel 19. Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	517.203.788
Normalisasi Data	
Mutasi Tambah	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Mutasi Kurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	517.203.788

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5,111,786,943.00)

C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing Rp(5,111,786,943) dan Rp(5,389,545,234) Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
30 Juni TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.536.967.016	5.111.786.943	425.180.073
	Akumulasi Penyusutan	5.536.967.016	5.111.786.943	425.180.073

Aset tak berwujud
Rp377.835.394,00

C.3. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp377.835.394,00** dan **Rp377.835.394,00** ,00 . Adapun rincian mutasi ATB per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Jenis Jenis Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 278.300.000
2	ATB Lainnya	Rp 99.535.394
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2024		Rp 377.835.394

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	377.835.394
Normalisasi Data	-
Mutasi Tambah	-
- Pembelian	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 30 Juni 2023	377.835.394
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	377.835.394

Aset Lain-Lain
Rp426,502,702.00

C.3.1. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp426,502,702.00 dan Rp0.00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Tabel 23. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	-
Normalisasi Data	
Mutasi Tambah	427.752.702
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	427.752.702
Mutasi Kurang	1.250.000
Ekstrakomptabel	1.250.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	426.502.702

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(683,297,636.00)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(683,297,636) dan Rp(269,134,25.00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Akumulasi
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	278.300.000	272.189.500	6.110.500
ATB Lainnya	99.535.394	0	99.535.394
Jumlah	377.835.394	272.189.500	105.645.894
Aset Lain Lain	427.752.702	411.108.136	16.644.566
Jumlah	805.588.096	683.297.636	122.290.460

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

Uang Muka dari KPPN
Rp120,000,000.00

C.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp120,000,000.00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp290,446,211.00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp290,446,211.00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari gaji pegawai PNS bulan Juli, honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 dan Gaji pegawai Outsourcing yang belum dibagikan kepada pegawai.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PNS Bulan Juli 2023 untuk 30 orang Satker Balai Besar Riset Sosial KP	220.569.625
2	Pembayaran Belanja Barang berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2023 untuk 13 Pegawai sesuai SK No.B.6/BRSDM-BBRSEKP/TU.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	67.266.000
3	Pembayaran UP KKP	2.610.586
Jumlah		290.446.211

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp24,989,000.00

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24,989,000.00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus ditagihkan dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Yang Belum Diterima Tagihannya merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan dan pencatatannya berdasarkan Dokumen BAST. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Tabel 25. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang yang belum ditagihkan	24.989.000
Jumlah		24.989.000

Utang yang belum ditagihkan berasal dari kuitansi UP yang belum di-SPM kan

Ekuitas
Rp790,730,596.00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp790,730,596.00 dan Rp1,224,695,851.00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pendapatan PNB
Rp0,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Pendapatan tersebut terdiri dari

Tabel 26. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30-Jun-24	30-Jun-23	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai
Rp4,041,943,672.00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Semester I TA. 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp4,041,943,672.00 dan Rp3,620,786,857.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Semester I TA 2024	Semester I TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.041.943.672	3.620.786.857	11,63
Jumlah	4.041.943.672	3.620.786.857	11,63

Beban Pegawai terjadi kenaikan sebesar 11,63 % disebabkan karena adanya Kenaikan Pagu Belanja pegawai Tahun 2024 dari pagu tahun 2023 yang menyebabkan realisasi belanja pegawai yang disebabkan karena adanya Penambahan Pegawai PNS dan PPPK serta Jabatan Fungsional.

Beban Persediaan
Rp57,360,599.00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp57,360,599.00 dan Rp30.983.809,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Semester I TA. 2024	Semester I TA. 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	57.360.599	30.983.809	85,13
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	57.360.599	30.983.809	85,13

Beban persediaan terjadi kenaikan sebesar 85,13 % dikarenakan kenaikan pagu anggaran belanja barang persediaan barang konsumsi dari tahun lalu karena kebutuhan pegawai untuk menggunakan barang konsumsi untuk penggunaan operasional perkantoran.

*Beban Barang dan Jasa
Rp773,040,315.00*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2024 dan 2023 adalah masing - masing senilai Rp773,040,315.00 dan Rp1.082.335.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Semester I TA. 2024	Semester I TA. 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	618.305.115	963.164.719	(35,80)
Beban Bahan	17.993.600		
Beban Barang Non Operasional	11.000.000	36.170.600	(69,59)
Beban Jasa Profesi	-	32.400.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	120.491.600	45.350.000	165,69
Beban Jasa Sewa	5.250.000	5.250.000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	773.040.315	1.082.335.319	(28,58)

Beban barang dan jasa terjadi penurunan sebesar 28,58 % dikarenakan adanya penurunan pembayaran honor tenaga PPNPN yang sudah diangkat menjadi PPPK ke satker lain.

*Beban Pemeliharaan
Rp150,200,859.00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp150,200,859.00 dan Rp110.486.394,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA. 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.200.859	110.486.394	35,95
Jumlah	150.200.859	110.486.394	35,95

Beban Pemeliharaan terjadi kenaikan sebesar 35,95 % disebabkan adanya kenaikan kebutuhan pemeliharaan oleh Peralatan dan Mesin yang rusak agar tetap menjadi optimal.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp286,078,345.00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp286,078,345.00 dan Rp335.838.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	286.078.345	335.838.244	-14,82
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	
Jumlah	286.078.345	335.838.244	-14,82

Beban perjalanan dinas TA 2024 turun sebesar 14,82 % dikarenakan adanya blokir AA yang menyebabkan tidak bisa menggunakan pagu anggaran dengan maksimal.

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp136,405,095.00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp136,405,095.00 dan Rp 178,525,170.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 & TA 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester I TA 2024	Semester I TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.111.786.943)	225.488.610	-2366,98
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	(411.108.136)	-	
Jumlah Penyusutan	(5.522.895.079)	225.488.610	-2549,30
Beban Amortisasi Software	272.189.500	40.876.961	565,88
Jumlah Amortisasi	272.189.500	40.876.961	565,88
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	(5.250.705.579)	266.365.571	-2071,24

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
Rp41,540,186.00

D.8. Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41,540,186.00 dan Rp12,250,000.00

Tabel 29. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	Semester I TA 2024	Semester I TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	41.540.186	12.250.000	239,10
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	41.540.186	12.250.000	239,10
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut Darat	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	41.540.186	12.250.000	239,10

Pendapatan kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang TAYL sebesar Rp41,540,186.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1,224,695,851.00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,224,695,851.00 dan Rp 2,277,987,363.00

Defisit LO
Rp(5,403,488,699.00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(5,403,488,699.00) dan Rp Rp(5,345,781,793.00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi
Rp47,400.00

E.3. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp47,400.00 dan Rp0.00 Tidak terjadi koreksi. Koreksi ini merupakan penyesuaian nilai aset, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi, dan koreksi lain-lain.

Transaksi antar entitas
Rp4,969,476,044.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,969,476,044.00 dan Rp4,859,945,273.00 Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 21. Rincian Transaksi Antar Entitas

Diterima dari entitas lain	51.020.186
Ditagihkan ke entitas lain	5.020.496.230
Transfer masuk	-
Transfer keluar	-
Pengesahan hibah langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.969.476.044

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada /KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp(51,020,186.00) sedangkan DKEL sebesar Rp5,020,496,230.00

Ekuitas Akhir
Rp790,730,596.00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp790,730,596.00 dan Rp1,792,150,843.00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

**F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA SEMESTER I TAHUN 2024**

Tidak ada penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. PROGRESS TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN

Melakukan penyesuaian jurnal manual untuk penyesuaian transaksi atas penyusunan jurnal tahun 2023. Jurnal yang dibuat adalah:

Akun	Uraian		Debit	Kredit
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		840.000	
115212		Piutang Lainnya		840.000
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		4.200	
391119		Koreksi Lainnya		4.200
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		6.480.000	
115212		Piutang Lainnya		6.480.000
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		32.400	
391119		Koreksi Lainnya		32.400
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.160.000	
115212		Piutang Lainnya		2.160.000
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		10.800	
391119		Koreksi Lainnya		10.800

F.2.2. REVISI DIPA

Pada Triwulan I Tahun 2024, revisi DIPA dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. DIPA Awal TA 2024 terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan kode *Digital Stamp* 2249-6049-6490-7701 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00;
2. Revisi ke-1 terbit pada tanggal 29 Januari 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Perubahan DIPA Halaman III RPD dalam rangka Penyesuaian Kebijakan AA dengan tujuan untuk menindaklanjuti kebijakan AA Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;
3. Revisi ke-2 terbit pada tanggal 19 Februari 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap; dan
4. Revisi ke-3 terbit pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman IV B DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap.

Pada Triwulan II Tahun 2024, revisi DIPA dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

5. Revisi ke-4 terbit pada tanggal 22 April 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap; dan
6. Revisi ke-5 terbit pada tanggal 03 Juni 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap.

F.2.3. SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani,
M.T.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.527/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Fahru Rachman, S.E., M.M
Pejabat : Heny Lestari, S.E
Penandatanganan/Penguji
SPM

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.453/KPA/BBRSEKP/KU.510/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran : Titin Hasanah, S.E
Bendahara Gaji : Sujana

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0	120,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,610,586	0	2,610,586	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	9,480,000	(9,480,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(47,400)	47,400	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	9,432,600	(9,432,600)	(100.00)
Persediaan	40,130,900	15,433,835	24,697,065	160.02
JUMLAH ASET LANCAR	162,741,486	24,866,435	137,875,051	554.46
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	5,536,967,016	5,963,469,718	(426,502,702)	(7.15)
Aset Tetap Lainnya	517,203,788	517,203,788	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,111,786,943)	(5,389,545,234)	277,758,291	(5.15)
JUMLAH ASET TETAP	942,383,861	1,091,128,272	(148,744,411)	(13.63)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	377,835,394	377,835,394	0	0.00
Aset Lain-lain	426,502,702	0	426,502,702	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(683,297,636)	(269,134,250)	(414,163,386)	153.89
JUMLAH ASET LAINNYA	121,040,460	108,701,144	12,339,316	11.35
JUMLAH ASET	1,226,165,807	1,224,695,851	1,469,956	0.12
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	290,446,211	0	290,446,211	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	24,989,000	0	24,989,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	120,000,000	0	120,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	435,435,211	0	435,435,211	
JUMLAH KEWAJIBAN	435,435,211	0	435,435,211	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	790,730,596	1,224,695,851	(433,965,255)	(35.43)
JUMLAH EKUITAS	790,730,596	1,224,695,851	(433,965,255)	(35.43)
JUMLAH EKUITAS	790,730,596	1,224,695,851	(433,965,255)	(35.43)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,226,165,807	1,224,695,851	1,469,956	0.12

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

Tgl Data : 14/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:56 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 14 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:54 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,041,943,672	3,620,786,857	421,156,815	11.632
Beban Persediaan	57,360,599	30,983,809	26,376,790	85.131
Beban Barang dan Jasa	773,040,315	1,081,411,319	(308,371,004)	(28.516)
Beban Pemeliharaan	150,200,859	110,486,394	39,714,465	35.945
Beban Perjalanan Dinas	286,078,345	335,838,244	(49,759,899)	(14.817)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:54 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	136,405,095	178,525,170	(42,120,075)	(23.593)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,445,028,885	5,358,031,793	86,997,092	1.624
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,445,028,885)	(5,358,031,793)	(86,997,092)	1.624
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,540,186	12,250,000	29,290,186	239.104
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,540,186	12,250,000	29,290,186	239.104
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	41,540,186	12,250,000	29,290,186	239.104
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,403,488,699)	(5,345,781,793)	(57,706,906)	1.079
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,403,488,699)	(5,345,781,793)	(57,706,906)	1.079

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:20 AM
Tgl Cetak : 14/07/24 9:54 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,224,695,851	2,277,987,363	(1,053,291,512)	(46.24)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,403,488,699)	(5,345,781,793)	(57,706,906)	1.08
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	47,400	0	47,400	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	47,400	0	47,400	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,969,476,044	4,859,945,273	109,530,771	2.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(433,965,255)	(485,836,520)	51,871,265	(10.68)
EKUITAS AKHIR	790,730,596	1,792,150,843	(1,001,420,247)	(55.88)

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 14 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 403836

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 14/07/24 9:55 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	51,020,186	51,020,186	0	0	12,250,000	(12,250,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	51,020,186	51,020,186	0	0	12,250,000	(12,250,000)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	51,020,186	51,020,186	0	0	12,250,000	(12,250,000)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	12,300,000,000	5,020,496,230	(7,279,503,770)	41	10,550,000,000	4,872,195,273	5,677,804,727	46
1. Belanja Pegawai	8,000,000,000	3,821,374,047	(4,178,625,953)	48	7,300,000,000	3,411,557,676	3,888,442,324	47
2. Belanja Barang	4,300,000,000	1,199,122,183	(3,100,877,817)	28	3,250,000,000	1,460,637,597	1,789,362,403	45
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 403836

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 14/07/24 9:55 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	12,300,000,000	5,020,496,230	(7,279,503,770)	41	10,550,000,000	4,872,195,273	5,677,804,727	46
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 14 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 403836
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
DKI JAKARTA
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/24 9:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/24 6:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,380,000,000	2,257,832,000	1,237,180,660	0	1,237,180,660	54.8	1,020,651,340
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,120,000	12,063,000	19,611	0	19,611	0.16	12,043,389
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	266,400,000	264,708,000	91,706,510	0	91,706,510	34.64	173,001,490
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	128,200,000	127,740,000	28,985,806	0	28,985,806	22.69	98,754,194
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	48,900,000	46,050,000	16,200,000	0	16,200,000	35.18	29,850,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	618,000,000	588,724,000	205,851,000	0	205,851,000	34.97	382,873,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	37,592,000	55,546,000	21,018,767	0	21,018,767	37.84	34,527,233
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	149,000,000	147,330,000	66,336,720	0	66,336,720	45.03	80,993,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	300,000,000	240,000,000	92,537,000	0	92,537,000	38.56	147,463,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,200,000	25,705,000	8,840,000	0	8,840,000	34.39	16,865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,966,412,000	3,765,698,000	1,768,676,074	0	1,768,676,074	46.97	1,997,021,926
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	70,000,000	252,000,000	99,756,800	0	99,756,800	39.59	152,243,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	55,000	96,000	2,456	0	2,456	2.56	93,544
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,000,000	12,000,000	4,849,920	0	4,849,920	40.42	7,150,080
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,500,000	3,600,000	914,816	0	914,816	25.41	2,685,184
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24,000,000	32,400,000	15,840,000	0	15,840,000	48.89	16,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,400,000	14,400,000	4,634,880	0	4,634,880	32.19	9,765,120
511628	Belanja Uang Makan PPPK	120,000,000	26,400,000	11,148,000	0	11,148,000	42.23	15,252,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	229,955,000	340,896,000	137,146,872	0	137,146,872	40.23	203,749,128
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	17,833,000	25,927,000	2,171,000	0	2,171,000	8.37	23,756,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,796,000	7,800,000	494,000	0	494,000	6.33	7,306,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	19,629,000	33,727,000	2,665,000	0	2,665,000	7.9	31,062,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,624,000,000	3,635,679,000	1,785,753,732	0	1,785,753,732	49.12	1,849,925,268
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	160,004,000	224,000,000	127,132,369	0	127,132,369	56.76	96,867,631
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,784,004,000	3,859,679,000	1,912,886,101	0	1,912,886,101	49.56	1,946,792,899
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,000,000,000	8,000,000,000	3,821,374,047	0	3,821,374,047	47.77	4,178,625,953
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,272,983,000	1,210,956,000	451,185,284	0	451,185,284	37.26	759,770,716

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 403836
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
DKI JAKARTA
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/24 9:59 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/24 6:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	122,520,000	115,320,000	46,442,000	0	46,442,000	40.27	68,878,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	157,000,000	128,542,000	53,411,831	0	53,411,831	41.55	75,130,169
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,552,503,000	1,454,818,000	551,039,115	0	551,039,115	37.88	903,778,885
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	291,689,000	256,876,000	17,993,600	0	17,993,600	7	238,882,400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	71,780,000	71,780,000	0	0	0	0	71,780,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	407,469,000	372,656,000	17,993,600	0	17,993,600	4.83	354,662,400
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	162,000,000	151,859,000	76,925,664	0	76,925,664	50.66	74,933,336
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	162,000,000	151,859,000	76,925,664	0	76,925,664	50.66	74,933,336
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	18,000,000	12,600,000	5,250,000	0	5,250,000	41.67	7,350,000
522151	Belanja Jasa Profesi	193,000,000	143,500,000	0	0	0	0	143,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	302,051,000	287,937,000	120,491,600	0	120,491,600	41.85	167,445,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	513,051,000	444,037,000	125,741,600	0	125,741,600	28.32	318,295,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	343,446,000	336,746,000	150,200,859	0	150,200,859	44.6	186,545,141
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	343,446,000	336,746,000	150,200,859	0	150,200,859	44.6	186,545,141
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	956,490,000	1,115,218,000	156,708,956	0	156,708,956	14.05	958,509,044
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	135,830,000	147,900,000	49,770,000	0	49,770,000	33.65	98,130,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	229,211,000	276,766,000	70,742,389	0	70,742,389	25.56	206,023,611
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,321,531,000	1,539,884,000	277,221,345	0	277,221,345	18	1,262,662,655
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,300,000,000	4,300,000,000	1,199,122,183	0	1,199,122,183	27.89	3,100,877,817
	JUMLAH BELANJA	12,300,000,000	12,300,000,000	5,020,496,230	0	5,020,496,230	40.82	7,279,503,770

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 403836

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DKI JAKARTA

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl. Cetak 14/07/2024 9:59 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	9,480,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	47,400
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,433,835	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,963,469,718	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	517,203,788	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,389,545,234
0.0	162151	Software	278,300,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	99,535,394	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	269,134,250
0.0	391111	Ekuitas	0	1,224,695,851
JUMLAH			6,883,422,735	6,883,422,735

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,610,586	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	40,130,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,536,967,016	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	517,203,788	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,111,786,943
0.0	162151	Software	278,300,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	99,535,394	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	426,502,702	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	411,108,136
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	272,189,500
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	220,569,625
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	67,266,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,610,586
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	24,989,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	120,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,020,496,230
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	51,020,186	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,224,695,851
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	47,400
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,334,094
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,206,092
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,390,397,760	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,509	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	102,947,270	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,518,152	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,225,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	231,220,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	21,308,856	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	74,375,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	92,537,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,945,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	112,226,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,716	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,456,160	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,029,168	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17,820,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:57 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,214,240	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,148,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	2,171,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	494,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,785,753,732	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	127,132,369	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	518,451,284	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46,442,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	53,411,831	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,993,600	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,250,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	120,491,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,200,859	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	156,708,956	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,340,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76,029,389	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	128,019,786	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,055,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5,330,059	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	57,360,599	0
JUMLAH			12,517,299,457	12,517,299,457

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 14 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (403836) BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Tgl Data : 14/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 14/07/24 9:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,020,496,230
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	51,020,186	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,814,094
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,206,092
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,237,180,660	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,611	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91,706,510	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,985,806	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	205,851,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,018,767	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	66,336,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	92,537,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,840,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	99,756,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,456	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,849,920	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	914,816	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,840,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,634,880	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,148,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	2,171,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	494,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,785,753,732	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	127,132,369	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	451,185,284	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46,442,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,411,831	0
3.0	521211	Belanja Bahan	17,993,600	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76,925,664	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,250,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	120,491,600	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,200,859	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156,708,956	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49,770,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70,742,389	0
JUMLAH			5,071,516,416	5,071,516,416

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

DKI JAKARTA, 14 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI
197204102002122003

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

 Gedung BRSDM KP II, Lantai 2
Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430